



# **DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ( ZI ) POLTEKPAR MAKASSAR TAHUN 2020**



**DOKUMEN RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ( ZI )  
POLTEKPAR MAKASSAR TAHUN 2020**



Oleh:

**TIM KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)  
POLTEKPAR MAKASSAR TAHUN 2020**

**PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS POLITEKNIK PARIMWISATA MAKASSAR TAHUN 2020**

Makassar, 08 September 2020  
Mengesahkan  
Direktur Poltekpar Makassar

**Drs. Muhammad Arifin, M.Pd.**  
NIP. 196301071992031001

Ketua Pembangunan Zona Integritas  
Poltekpar Makassar

**Dr. Ali Muhtasom, S.Sos.MM.**  
NIP. 19710611 199603 1001

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)  
/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (BBM)  
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR TAHUN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya ***pembangunan Zona Integritas***. Dalam rangka pembangun Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :

(1) Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan zona integritas pada Politeknik Pariwisata Makassar dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

## 1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang -undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2010-2025
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
10. Peraturan Presiden 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

## 1.3 Maksud dan Tujuan

1. Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Politeknik Pariwisata Makassar dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
2. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona

Integritas menuju WBK/WBBM dilingkungan Politeknik Pariwisata Makassar.

#### 1.4 Pengertian Umum.

Dalam dokumen rencana kerja ini, yang dimaksud dengan :

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar *manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.*
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah; Unit Kerja adalah Unit/satuan Kerja di instansi Pemerintah, serendah rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
5. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM
7. Unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.

Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu *komponen pengungkit* dan *komponen hasil*. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen.



Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan *komponen pengungkit* yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan public

## **BAB II**

### **PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

#### 2.1 Pencanaan Pembangunan Zona Integritas

1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas adalah dengan deklarasi / pernyataan dari pimpinan Politeknik Pariwisata Makassar bahwa Politeknik Pariwisata Makassar telah siap membangun Zona Integritas.
2. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh pimpinan/Direktur Poltekpar Makassar dan seluruh atau sebagian besar pegawai Poltekpar Makassar telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas akan dilakukan secara masal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal dan vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan / melengkapi setelah perencanaan pembangunan Zona Integritas;
3. Pencanaan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

#### 2.2 Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Program Pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut perencanaan yang telah dilakukan oleh pimpinan. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.



### **BAB III**

## **RENCANA AKSI / RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

3.1. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) mempunyai beberapa Komponen antara lain :

#### **I. Manajemen Perubahan**

Komponen Manajemen Perubahan memiliki Indikator sebagai berikut :

##### **1. Penyusunan Tim Kerja**

Penyusunan Tim Kerja ini dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- b. Pembentukan Tim ini dilakukan melalui prosedur atau mekanisme yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama oleh manajemen Poltekpar Makassar.
- c. Direktur Poltekpar Makassar bertanggung jawab atas pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

##### **2. Dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**

Penyusunan Dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah memuat target-target prioritas yang relevan sesuai dengan tujuan.
  - b. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah disediakan.
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut :

- a. Seluruh kegiatan pemantauan dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan.
- b. Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah ditindak lanjuti

4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja

Perubahan pola pikir dan budaya kerja ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pimpinan menjadi role model dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- b. Pemilihan agen perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.
- c. Pembangunan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Poltekpar Makassar
- d. Keterlibatan Dosen dan seluruh Aparatur Sipil Negara Poltekpar Makassar dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

## II. Penataan Tata Laksana

Komponen Penataan Tata Laksana memiliki Indikator sebagai berikut :

### 1. Standar Operasioanal Prosedure (SOP)

Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) telah mengacu pada Proses Peta Bisnis Poltekpar Makassar
- b. Penerapan Standar Operasional Prosedure (SOP)
- c. Reviu/Perbaikan Standar Operasional Prosedure (SOP)

### 2. E-Office/E-Govenment

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyusunan Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Informasi
- b. Penyusunan Sistem Kepegawaian Berbasis sistem Informasi
- c. Penyusunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi

### 3. Keterbukaan Informasi Publik

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penerapan kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Monitoring dan Evaluasi Penerapan kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. Pembentukan PPID di Poltekpar Makassar

III. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki Indikator sebagai berikut :

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai pada Poltekpar Makassar yang mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja
- b. Monitoring dan Evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai pada Politeknik Pariwisata Makassar

2. Pola Mutasi Internal

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan pola mutasi internal
- b. Menerapkan kebijakan pola mutasi internal
- c. Monitoring dan Evaluasi kebijakan pola mutasi internal

3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan upaya pengembangan kompetensi
- b. Memberikan kesempatan kepada Dosen dan Aparatur Sipil Negara pada Poltekpar Makassar untuk mengikuti pengembangan kompetensi

4. Penetapan Kinerja Individu

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penerapan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
- b. Penerapan penetapan kinerja individu sesuai indikator level atasnya

- c. Penerapan penetapan kinerja individu secara periodik
  - d. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik Pegawai Poltekpar Makassar  
Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Penerapan Aturan Disiplin/Kode Etik Pegawai, Dosen dan Tenaga pendidik telah dilaksanakan
6. Sistem Informasi Kepegawaian  
Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pemutakhiran Informasi Kepegawaian telah dilakukan secara berkala melalui Sister & Simpeg

#### IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Komponen Penguatan Akuntabilitas Kinerja memiliki Indikator sebagai berikut :

##### 1. Keterlibatan Pimpinan

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan
- b. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja
- c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

##### 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan yang telah berorientasi hasil
- b. Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (SMART)
- c. Penyusunan Laporan Kinerja tepat waktu
- d. Peningkatan Kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas Kinerja

## V. Penguatan Pengawasan

Komponen Penguatan Pengawasan memiliki Indikator sebagai berikut :

### 1. Pengendalian Gratifikasi

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Public Campaign tentang Pengendalian Gratifikasi
- b. Mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi

### 2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membangun Lingkungan Pengendalian Unit Kerja
- b. Membentuk unit pelaksana SPIP Poltekpar Makassar
- c. Mensosialisasikan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) kepada pihak terkait
- d. Memaksimalkan peran SPIP dalam setiap kegiatan

### 3. Pengaduan Masyarakat

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menerapkan Kebijakan Pengaduan Masyarakat
- b. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat
- c. Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat

### 4. Whistle Blowing System

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menerapkan Whistle Blowing System
- b. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Whistle Blowing System
- c. Menindak lanjuti hasil Evaluasi Penerapan Whistle Blowing System

### 5. Penanganan Benturan Kepentingan

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
- b. Mensosialisasikan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan
- c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Benturan Kepentingan
- d. Menindaklanjuti hasil Evaluasi Pelaksanaan Benturan Kepentingan

## VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik memiliki Indikator sebagai berikut :

### 1. Standar Pelayanan Pengukuran Indikator :

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) Pelayanan
- b. Menerapkan Standar Operasional Prosedure (SOP) Pelayanan
- c. Melakukan reuiu Standar Operasional Prosedure (SOP) Pelayanan
- d. Melakukan Sosialisasi Standar Operasional Prosedure (SOP) Pelayanan
- e. Memiliki informasi tentang standar pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media
- f. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat
- g. Monitoring dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat

3.2 TABEL RENCANA AKSI / RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

No	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
1	2	3	4	5	6
I	MANAJEMEN PERUBAHAN	1. Penyusunan Tim Kerja	a. Menyusun SOP pemilihan tim kerja ZI – WBK/WBBM	- SOP Pemilihan Tim Kerja ZI-WBK/WBBM	September 2020 Selesai 100%
			b. Membuat Undangan Pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM	Undangan pembentukan Tim Kerja ZI WBK/WBBM	September 2020 Selesai 100%
			c. Rapat Pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM	- Notulen, Absensi Rapat, Foto Kegiatan / Dokumentasi Rapat	September 2020 Selesai 100%
			d. Pengesahan Tim Kerja WBK/WBBM oleh Direktur Poltekpar Makassar	- SK Tim Kerja WBK/WBBM	September 2020 Selesai 100%
		2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	a. Membuat Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	- Dokumen Rencana Kerja pembangunan ZI - Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI tahun 2020, Foto / Dokumentasi Kegiatan	September 2020 DRK-ZI selesai 100% DRA-ZI selesai 100% Sosialisasi DRK/DRA-ZI di Website



			<p><b>b. Membuat Target-target Prioritas yang Relevan dengan Tujuan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</b></p>	<p>Surat Keputusan tentang Rencana pembangunan Zona Integritas dan Target Prioritas</p> <p>Dokumen Rencana Aksi yang berisi Target Prioritas di umumkan di website Poltekpar Makassar</p>	<p>DRK/DRA-ZI belum di upload di website</p>
			<p><b>c. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kepada Seluruh Aparatur Sipil Negara Poltekpar Makassar dan Masyarakat</b></p> <p><b>d. Deklarasi Pembangunan Zona Integritas</b></p>	<p>Foto / Dokumentasi Sosialisasi Pencangangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan Penandatanganan Komitmen Bersama/ Pakta Integritas Spanduk dan Banner (running teks) pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM diLingkungan Kerja,</p> <p>Capture Website, Media sosial, Media Elektronik/Cetak</p> <p>Penanda tanganan Pakta Integritas semua PNS Poltekpar Makassar</p>	<p>Pakta Integritas September 2020</p> <p>Ranning Teks September 2020</p> <p>Capture Website September 2020</p> <p>18 September 2020</p>

		<b>3. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</b>	<b>a. Melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala (Bulanan) Pembangunan Zona integritas Menuju WBK/WBBM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan, Notulen, Daftar Hadir dan Foto/ Dokumentasi Kegiatan</li> <li>- Dokumen Laporan Berkala Hasil Monitoring dan Evaluasi Secara Bulanan Laporan Tindak Lanjut Atas Laporan Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>	September 2020 selesai 100%
		<b>4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja</b>	<b>a. Pemilihan Role Model diantara Pimpinan (Direktur, Pudir, Kabag, Kasubag, Kajur, Kaprodi dalam Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pimpinan memberi teladan dalam berperilaku dan budaya kerja dengan tepat waktu masuk dan pulang kerja setiap hari, membuat laporan kerja harian dengan tepat dan akurat</b>  <b>b.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan, Daftar Hadir, Berita Acara dan SK Penunjukan Role Model</li> <li>- Dokumentasi Kegiatan penunjukan Role Model</li> <li>- Absensi Pimpinan dan Pegawai</li> <li>- Laporan Kerja Harian Pimpinan dan pegawai</li> </ul>	September 2020 Selesai 100%
			<b>c. Pemilihan Agen Perubahan diantara Staf Mengacu Pada PERMENPAN RB Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Penetapan Agen Perubahan Poltekipar Makassar</li> </ul>	September 2020 Selesai 100%

			<b>d. Pembangunan Budaya Kerja dan Pola Pikir berupa</b> - Integritas - Etos kerja - Gotong Royong	- Kode Etik Dosen dan Perilaku ASN Poltekpar Makassar	September 2020 Selesai 100%
			<b>e. Pimpinan &amp; Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?</b>	- Nota Dinas Direktur untuk membangun budaya kerja pelayanan prima - Video/Foto/dokumentasi pelayanan pegawai terhadap masyarakat/ stake holder	September 2020 Selesai 100%
II	<b>PENATAAN TATA LAKSANA</b>	<b>1. Standar Operasional Procedure (SOP)</b>	<b>a. Penyusunan Standar Operasional Procedure (SOP) sudah sesuai dengan proses bisnis Poltekpar makassar</b> <b>b. Penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) sudah menggunakan teknologi informasi</b> <b>c. Evaluasi Standar Operasional Procedure (SOP)</b>	- Dokumen Standar Operasional Procedure (SOP) - Foto/dokumentasi teknologi dalam pelayanan - Dokumen Reviu SOP yang di sahkan Direktur Poltekpar Makassar	September 2020 Selesai 100%

		<b>2. E-Office/E-Government</b>	<b>a. Penyusunan Sistem Pengukuran kinerja Berbasis Sistem Informasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capture Krisna</li> <li>- Capture Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA)</li> <li>- Capture Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)</li> <li>- Capture Aplikasi Persediaan Gaji Pokok Pegawai (GPP)</li> <li>- Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP</li> <li>- Capture SISTER</li> <li>- Capture SIAKAD</li> <li>- Capture SMART OFFICE</li> </ul>	September 2020 Selesai 100%
			<b>b. Penyusunan Sistem Kepegawaian Kinerja Berbasis Sistem Informasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capture Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)</li> </ul>	September 2020 Selesai 100%
			<b>c. Penyusunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Website Resmi Poltekpar Makassar</li> <li>- Aplikasi Indeks Kepuasan Pelanggan Smart Office</li> </ul>	September 2020 Selesai 100%
		<b>3. Keterbukaan Informasi Publik</b>	<b>a. Penerapan Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK tentang Layanan Informasi/ Penetapan Tim PPID</li> <li>- Banner tentang Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik/smart office</li> <li>- Website tentang Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Penerapan Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Media Sosial</li> </ul>	September 2020 Selesai 100%

			<b>b. Memiliki Website dengan Informasi Terkini yang Memudahkan Masyarakat Pencari informasi</b>	- <b>Capture Website Poltekpar Makassar</b>	September 2020 Selesai 100%
			<b>c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik</b>	- <b>Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto/Dokumentasi Rapat Monev</b>	September 2020 Selesai 100%
<b>III</b>	<b>PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA /SDM</b>	<b>1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi</b>	<b>a. Menyusun Analisa Kebutuhan Pegawai dalam Hal Rasio dan Beban Kerja dan Kualifikasi Pendidikan yang Mengacu Pada Peta Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja</b>	- <b>Dokumen Analisis Jabatan (Anjab)</b> - <b>Dokumen Analisis Beban Kerja Pegawai (ABK)</b> - <b>Bezzeting 2020-2024</b>	September 2020 Selesai 100%
			<b>b. Menyusun Monitoring dan Evaluasi Rencana Kebutuhan Pegawai</b>	- <b>Dokumen Monitoring dan Evaluasi Rencana Kebutuhan Pegawai</b>	September 2020 Selesai 100%
		<b>2. Pola Mutasi Internal</b>	<b>a. Penyusunan Kebijakan Pola Mutasi Internal</b>	- <b>SK Tim Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (BAPERJAKAT)</b> <b>SK Mutasi/penempatan pegawai 2020</b>	September 2020 Selesai 100%
			<b>b. Penerapan Kebijakan Pola Mutasi Internal</b>	- <b>SK Mutasi Internal</b>	September 2020 Selesai 100%
			<b>c. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pola Mutasi Internal</b>	- <b>Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pola Mutasi Internal</b>	September 2020 Selesai 100%
		<b>3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi</b>	<b>a. Pengembangan Kompetensi (Capacity Building/Transfer Knowledge)</b>	- <b>SK/Dokumen Pengiriman pegawai/aparatur Sipil Negara untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), <i>workshop, seminar</i></b>	September 2020 Selesai 100%

			<b>b. Menyusun Daftar Dosen dan Aparatur Sipil Negara untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Maupun Pengembangan Kompetensi Lainnya</b>	- <b>Dokumen Pengiriman pegawai/ Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT),worshop,seminar</b>	September 2020 Selesai 100%
			<b>c. Meningkatkan Profesionalisme SDM Aparatur Pada Poltekpar Makassar</b>	- <b>Dokumen program pengembangan SDM (RKAKL)</b> - <b>SK pengembangan SDM</b> - <b>Laporan Monev pengembangan SDM</b>	September 2020 Selesai 100%
			<b>d. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan profesi</b>	- <b>Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pengembangan Profesi</b>	September 2020 Selesai 100%
		<b>4. Penetapan Kinerja individu</b>	<b>a. Menyusun Penilaian Kinerja Individu</b>	- <b>Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2020</b>	September 2020 Selesai 100%
			<b>b. Pengukuran Kinerja Individu Telah Memiliki Kesesuaian dengan Indikator Kinerja Individu Level Atasnya</b>	- <b>Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) structural Triwulan I 2020</b>	September 2020 Selesai 100%
			<b>c. Melakukan Pengukuran Kinerja Individu Secara Periodik</b>	- <b>Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Triwulan I 2020</b>	September 2020 Selesai 100%
			<b>d. Hasil Penilaian Kinerja Individu Telah Diimplementasikan Mulai dari Penerapan Sampai Dengan Pemantauan</b>	- <b>Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)</b> - <b>LKH Pegawai</b>	September 2020 Selesai 100%

		<b>5. Penegakan Aturan Displin/Kode Etik/Kode Perilaku</b>	<b>a. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Melalui Penerapan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai</b>	- Absensi Pegawai, - Laporan Kerja Harian - Ijin Keluar Kantor - CCTV monitoring - <i>Berita Acara punishment</i>	September 2020 Selesai 100%
			<b>b. Meningkatkan Disiplin SDM Aparatur Pada Poltekpar Makassar</b>	- Daftar Absensi Dosen dan Pegawai - Aplikasi SIAKAD	September 2020 Selesai 100%
		<b>6. Sistem Informasi Kepegawaian Pada Unit Kerja Telah Di Mutakhirkan Secara Berkala</b>	<b>a. Meningkatkan Ketaatan Terhadap Pengelolaan SDM Aparatur Pada Poltekpar Makassar</b>	- Nota Dinas Direktur Poltekpar Makassar tentang Pemutakhiran data Simpeg dan Sister - Dokumen Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Pemetaan Jabatan dan Analisis Beban Kerja	September 2020 Selesai 100%
			<b>b. Sistem Informasi Kepegawaian Melalui Pemutakhiran Informasi Kepegawaian dilakukan Secara Terbuka</b>	- Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) - Aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER)	September 2020 Selesai 100%
			<b>c. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan SDM Aparatur Pada Poltekpar Makassar</b>	- Dokumen Rapat Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Mutasi - Dokumen Aplikasi SIMPEG & SISTER	September 2020 Selesai 100%

IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	1. Keterlibatan Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengadakan Rapat Perencanaan dan Anggaran.</li> <li>b. Menyusun Dokumen Perencanaan</li> <li>c. Menyusun Indikator Kinerja Utama</li> <li>d. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)</li> <li>e. Menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Strategis (Resntra),</li> <li>f. Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi Rapat</li> <li>- Penyusunan Perencanaan (Renstra, Renja, RKAKL)</li> <li>- Dokumen Renstra, Renja, RKAKL</li> <li>- Dokumen Perjanjian Kinerja LAKIP 2019</li> </ul>	September 2020 Selesai 100%
		2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun Standar Operasional Prosedure (SOP) Pelayanan</li> <li>b. Membuat Aplikasi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> <li>c. Menyusun SK Pengendalian Gratifikasi</li> <li>d. Menyusun Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)</li> <li>e. Menyusun Standar Operasional Prosedure (SOP) Penanganan Pengaduan Masyarakat</li> <li>f. Menyusun Standar Operasional Prosedure (SOP) Penanganan Pengaduan Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen SOP Pelayanan</li> <li>- Dokumen Perencanaan yang Telah Berorientasi Hasil Indikator Kinerja Utama (IKU)</li> <li>- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)</li> <li>- Dokumen Rencana Kerja Tahunan Rencana Strategis (Resntra)</li> <li>- SK Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)</li> <li>- Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>- SK Pengendalian Gratifikasi</li> <li>- Standar Operasional Prosedure (SOP) Penanganan Pengaduan Masyarakat</li> <li>- Peraturan PPID</li> </ul>	September 2020 Selesai 100%
V	PENGUATAN PENGAWASAN	1. Pengendalian Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun Public Campaign Tentang Pengendalian Gratifikasi</li> <li>b. Menyusun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Pengendalian Gratifikasi</li> <li>- Capture, Banner/Media, runningtex</li> <li>- Public Campaign</li> <li>- Capture Close Circuit Television (CCTV)</li> <li>- Bukti Pengiriman (LHKASN)</li> <li>- Laporan LHKASN dan LHKPN</li> </ul>	September 2020 Selesai 100%



		<p><b>2. Pengawasan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)</b></p> <p><b>3. Pengaduan Masyarakat</b></p>	<p><b>a. Menyusun Analisis Resiko Poltekpar Makassar</b></p> <p><b>b. Melakukan Sosialisasi dan Mengimplementasikan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)</b></p> <p><b>c. Menerapkan standar penanganan pengaduan masyarakat</b></p> <p><b>d. Melakukan Tindak lanjut pengaduan masyarakat</b></p> <p><b>e. Monitoring penanganan pengaduan masyarakat</b></p> <p><b>f. Evaluasi penanganan pengaduan masyarakat</b></p>	<p>SK Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)</p> <p>Dokumen Matrik Identifikasi Resiko</p> <p>Dokumen Analisis Resiko</p> <p>Dokumen Level Resiko</p> <p>Dokumen Laporan Pengendalian Resiko</p> <p>Dokumentasi Rapat</p> <p>SK Petugas penanganan pengaduan Masyarakat/PPID</p> <p>Dokumen prosedur penanganan pengaduan masyarakat</p> <p>Dokumen laporan pengaduan masyarakat</p> <p>Dokumen Laporan Tindak Lanjut Pengaduan</p> <p>Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi laporan Pengaduan Tiap Bulan</p> <p>Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi laporan Pengaduan Tiap Bulan</p>	<p>September 2020</p> <p>Selesai 100%</p>
		<p><b>4. Whistle Blowing System (WBS)</b></p>	<p><b>a. Menyusun SK dan Standar Operasional Prosedure (SOP) Whistle Blowing System (WBS)</b></p> <p><b>b. Mensosialisasikan Whistle Blowing System (WBS)</b></p> <p><b>c. Menyusun Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut Penerapan Whistle Blowing System (WBS)</b></p>	<p>SK Whistle Blowing System (WBS)</p> <p>Standar Operasional Prosedure (SOP) Whistle Blowing System (WBS)</p> <p>Foto/Dokumentasi Kegiatan Whistle Blowing System (WBS)</p> <p>Banner, Running teks</p> <p>Dokumen Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut Atas Penerapan Whistle Blowing System (WBS)</p>	<p>September 2020</p> <p>Selesai 100%</p>

		<p><b>5. Penanganan Benturan Kepentingan</b></p>	<p><b>a. Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dalam Tugas dan Fungsi Utama</b></p> <p><b>b. Mensosialisasikan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan Mengimplementasikan Kebijakan</b></p> <p><b>c. Penanganan Benturan Kepentingan</b></p> <p><b>d. Menyusun Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan</b></p> <p><b>e. Menyusun Tindak Lanjut Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Identifikasi/ Pemetaan Benturan Kepentingan</li> <li>- Dokumentasi Rapat</li> <li>- Nota Dinas penanganan benturan kepentingan</li> <li>- Dokumen Surat Pernyataan</li> <li>- Bebas dari Benturan Kepentingan dari stake holder</li> <li>- Pakta Integritas</li> <li>- Dokumen Laporan Evaluasi Penanganan Benturan kepentingan</li> <li>- Dokumen Tindak Lanjut Hasil</li> <li>- Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan</li> </ul>	<p>September 2020 Selesai 100%</p>
VI	<p><b>PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b></p>	<p><b>1. Standar Pelayanan</b></p>	<p>a. Menyusun standar pelayanan minimal</p> <p>b. Menyusun maklumat standar pelayan dan mengumumkan di website</p> <p>c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan</p> <p>d. Mereview dan perbaiki atas standar pelayanan dan SOP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen standar pelayanan</li> <li>- Dokumen Standar Pelayanan ISO dan Tedquel</li> <li>- Capture maklumat Standar Pelayanan di website</li> <li>- Dokumen Standar Operasional Prosedure (SOP) Standar Pelayanan di setiap ruangan</li> <li>- Laporan kaji ulang SPP, perbaikan SOP, Laporan kaji ulang dokumen ISO 9001;2015</li> </ul>	<p>September 2020 Selesai 100%</p>

		<b>2..Budaya Pelaynan Prima</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telah dilakukan sosialisasi / pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima</li> <li>b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media</li> <li>c. Telah terdapat sistem punishment (sanksi) / reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila laayanan tidak sesuai standar</li> <li>d. Telah terdapat sarana layanan terpadu / terintegrasi</li> <li>e. Terdapat Inovasi pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar hadir, notulen, dokumen terkait</li> <li>- Foto poster, leaflet, screenshot website</li> <li>- Prosedur pemberian sanksi / reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. Memberikan sanksi / reward bagi pelaksana layanan</li> <li>- Counter pelayanan terpadu untuk mahasiswa, pegawai dan tamu</li> <li>- Smart office</li> </ul>	September 2020 Selesai 100%
		<b>3. Penilaian Kepuasan Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan survei masyarakat terhadap pelayanan</li> <li>b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka</li> <li>c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Survey setiap semester</li> <li>- Hasil survey di umumkan di website</li> <li>- Dokumen tindak lanjut hasil survey</li> </ul>	September 2020 Selesai 100%

## **BAB VI PENUTUP**

Unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas.

Pengembangan WBK/WBBM secara bertahap sejalan dengan konsep Island of Integrity. Diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai IPK Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada dunia internasional/global, bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan secara kontinyu dan komprehensif.

Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK/WBBM diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga semakin mengarah kepada zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi.

Lampiran 1.

**MEKANISME PENETAPAN TIM ZONA INTEGRITAS  
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**

1. Ketua Tim membuat rencana kegiatan dan mengidentifikasi jumlah dan kualifikasi kebutuhan personil Tim Kerja Poltekpar Makassar
2. Ketua Tim mengusulkan data-data pegawai yang ada sesuai kompetensi, pangkat dan golongan.
3. Ketua Memeriksa Memorandum dan menyerahkan kepada Direktur untuk disahkan Tim Zona Integritas sesuai usulan yang telah disetujui.
4. Ketua membuat draf Keputusan dan mengajukan kepada Direktur untuk mendapat persetujuan dan Tanda Tangan Direktur Poltekpar Makassar
5. Direktur menetapkan melalui “Keputusan” Tim Zona Integritas.
6. Ketua Tim menindaklanjuti pengelolaan SK dan meneruskan kepada Tim Kerja.
7. Ketua Tim melalui Kasubag Administrasi Umum mendokumentasikan Keputusan Tim Zona Integritas.

## DOKUMEN PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

### POLTEKPAR MAKASSAR TAHUN 2020

No	Target Prioritas
1	2
1	Pembentukan Tim Zona Integritas
2	Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3	Sosialisasi Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
4	Penguatan komitmen pembangunan Zona Integritas.
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas melalui pemantauan kegiatan strategis Pengadilan Negeri Karanganyar, tindak lanjut hasil audit internal maupun eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu pelaksanaan pembinaan Sistem Manajemen Mutu, serta penerapan standar pelayanan public.
6	Pelaksanaan Pelatihan peningkatan SDM
7	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi SOP kegiatan
8	Peningkatan disiplin dan profesionalisme pegawai.
9	Menyusun kegiatan dan penganggaran kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
10	Peningkatan akuntabilitas kinerja
11	Pelaksanaan pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian Intern
12	Peningkatan kepatuhan pengelolaan Keuangan Negara melalui laporan keuangan
13	Menetapkan Agen Perubahan
14	Meningkatkan partisipasi pegawai agar terlibat dalam Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
15	Pelaporan kegiatan TIM ZI.